

## Transformasi Digital Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di BAPENDA Prov. KALTENG

Christop Dwi Putra<sup>a\*</sup>, Meitiana<sup>a</sup>, Nazareno<sup>a</sup>, Rengga Andika Putra Herlambang<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 17-04-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 18-05-2026

**Keywords:** Accountability, Digital Transformation, Good Governance, Regional Finance, SIKD, SIPD, Transparency

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Keuangan Daerah, Good Governance, SIKD, SIPD, Transformasi Digital, Transparansi

Corresponding Author:

[Christop5061@gmail.com](mailto:Christop5061@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

Digital transformation in regional financial management is a strategic agenda to realize good governance in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of the Regional Financial Information System (SIKD) and the Regional Government Information System (SIPD) in increasing transparency and accountability of financial management at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Central Kalimantan Province. Using qualitative methods and a systematic literature review approach, this study analyzes various studies related to the digital transformation of regional finance in Indonesia during the period 2019-2026. The results of the analysis show that the implementation of SIKD/SIPD significantly contributes to increased transparency through access to real-time information, strengthening accountability through digital trail audits, and financial management efficiency. However, challenges such as limited human resource competencies, uneven technological infrastructure, and resistance to change remain major obstacles. This study concludes that the success of digital transformation requires synergy between technological aspects, institutional capacity, and leadership commitment to realize transparent, accountable, and sustainable regional financial management.

### ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan

metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur sistematis, penelitian ini menganalisis berbagai studi terkait transformasi digital keuangan daerah di Indonesia selama periode 2019-2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SIKD/SIPD secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi melalui akses informasi real-time, penguatan akuntabilitas melalui audit trail digital, serta efisiensi pengelolaan keuangan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan sinergi antara aspek teknologi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen kepemimpinan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia telah mendorong tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Rizki Maulidi et al., 2025). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan bertanggungjawab menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Suraya Murcitaningrum & Yorman, 2026).

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Rizki Maulidi et al., 2025). Sistem ini kemudian dikembangkan menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem tersebut dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah (Silvia Hardianti Manik et al., 2025). Transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis digital diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, dan memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah (Anwar et al., 2026).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan daerah menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan sistem informasi keuangan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Konteks geografis Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari

dataran dan perairan menambah kompleksitas dalam implementasi sistem digital yang memerlukan infrastruktur teknologi memadai dan sumber daya manusia yang kompeten (Fatoni, 2026).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi transformasi digital sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah? (2) Bagaimana peran transformasi digital dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi transformasi digital sistem keuangan daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi transformasi digital sistem informasi keuangan daerah dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kontribusi SIKD/SIPD dalam mendukung prinsip-prinsip *good governance*, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi transformasi digital keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur transformasi digital pemerintahan dan tata kelola keuangan publik di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan strategi implementasi sistem informasi keuangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Konsep Transformasi Digital dalam Sektor Publik; Transformasi digital merupakan perubahan fundamental dalam mekanisme kerja pemerintah yang berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi berbasis teknologi informasi (Andayani et al., 2024). Dalam konteks *New Public Management* (NPM), praktik transformasi digital berfokus pada efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi informasi publik. E-government sebagai manifestasi transformasi digital telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

Studi empiris menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah di Indonesia menghasilkan tiga kluster strategi utama: perencanaan berbasis *roadmap* dengan tingkat kematangan 4,27, orkestrasi layanan modular sebesar 3,68, dan interoperabilitas platform sebesar 2,91 (Murcitaningrum & Info, 2026). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi strategi digital menghasilkan pengurangan siklus layanan sebesar 82%, peningkatan akses informasi publik sebesar 89%, dan penurunan risiko korupsi sebesar 67%. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya memperkuat efisiensi administratif tetapi juga memperkuat fondasi etis dan normatif tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip

Pancasila.

Kerangka teoretis *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dalam organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), dan persepsi risiko (*perceived risk*) (Lakat, 2025). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh persepsi dan kesiapan pengguna dalam mengadopsi sistem baru.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan SIPD; Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan platform berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik (Padri, 2025). Implementasi SIKD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui dokumentasi, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan yang terstruktur dan sistematis. Studi kuantitatif terhadap 100 pemerintah daerah menunjukkan bahwa implementasi SIKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan koefisien regresi 0,72 ( $p < 0,001$ ).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai pengembangan dari SIKD memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran daerah (Daud et al., 2025). SIPD berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi di Gorontalo menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek efisiensi, transparansi, dan akurasi data keuangan. Kontribusi SIPD dan SDM terhadap akuntabilitas keuangan daerah mencapai 100% dalam menjelaskan variasi akuntabilitas keuangan.

Transformasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke SIPD dilatarbelakangi oleh keterbatasan sistem sebelumnya dalam hal integrasi, kecepatan proses, dan konsistensi pelaporan keuangan (Silvia Hardianti Manik et al., 2025). SIPD meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam empat aspek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): relevansi melalui ketepatan waktu pelaporan, keandalan melalui validasi otomatis, komparabilitas melalui standardisasi nasional, dan konsistensi melalui prosedur pelaporan yang seragam.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merujuk pada keterbukaan akses informasi keuangan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Siti Khofifah Hanif et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akurasi serta keandalan pelaporan keuangan, dan memperkuat

akuntabilitas pemerintah daerah. Akses terbuka terhadap dokumen anggaran yang didukung penerapan *e-government* dan *e-budgeting* terbukti mendorong partisipasi publik, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (Badewin et al., 2025). Studi empiris terhadap 187 laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit oleh BPK periode 2018-2022 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dan opini audit yang positif secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan. Platform *e-government* meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan, sementara interaksi antara sistem elektronik dan kompetensi pengelolaan keuangan memperkuat transparansi meskipun disparitas kapasitas teknis dan komitmen kepemimpinan menciptakan inkonsistensi regional.

Evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan bahwa 72% daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sementara 28% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer (Hardiyanto, 2025). Hambatan utama dalam pencapaian transparansi dan akuntabilitas meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, dan rendahnya partisipasi publik.

Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; *Good governance* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (Rafadiansyah & Ronaboyd Irfa, 2022). Studi empiris di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa transparansi meningkat melalui portal PPID namun masih terkendala ketepatan publikasi dan format data. Akuntabilitas belum substantif karena dominasi belanja rutin (83,9%) dibandingkan belanja modal (16,1%), sementara partisipasi publik bersifat formal melalui Musrenbang.

Penelitian di Kabupaten Kulon Progo mengkonfirmasi bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan (Cahyo et al., 2025). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap hukum, serta visi strategis terbukti meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

## **METODE**

### **Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic literature review*, deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi transformasi

digital sistem informasi keuangan daerah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika transformasi digital dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan temuan-temuan empiris dari berbagai studi terdahulu (Oktaviani et al., 2025).

### **Sumber Data dan Kriteria Seleksi**

Data penelitian diperoleh dari:

**Data Primer** dikumpulkan melalui: 1) Wawancara mendalam dengan informan kunci: operator SIPD, kepala bidang, kepala seksi, dan pejabat struktural terkait; 2) Observasi langsung terhadap proses verifikasi penerimaan keuangan; 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tim teknis pengelola sistem informasi

**Data Sekunder** meliputi: 1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2) Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); 3) Dokumen kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP); 4) Data statistik keuangan daerah dari instansi terkait.

Kriteria inklusi meliputi:

- [1] artikel jurnal peer-reviewed yang dipublikasikan dalam periode 2019-2026,
- [2] fokus pada implementasi sistem informasi keuangan daerah di Indonesia, dan
- [3] membahas aspek transparansi dan/atau akuntabilitas pengelolaan keuangan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan identifikasi dan kategorisasi temuan-temuan utama dari setiap publikasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk sintesis tematik yang mengelompokkan temuan berdasarkan aspek-aspek kunci transformasi digital keuangan daerah. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi integratif terhadap pola-pola temuan untuk merumuskan proposisi teoretis dan rekomendasi praktis.

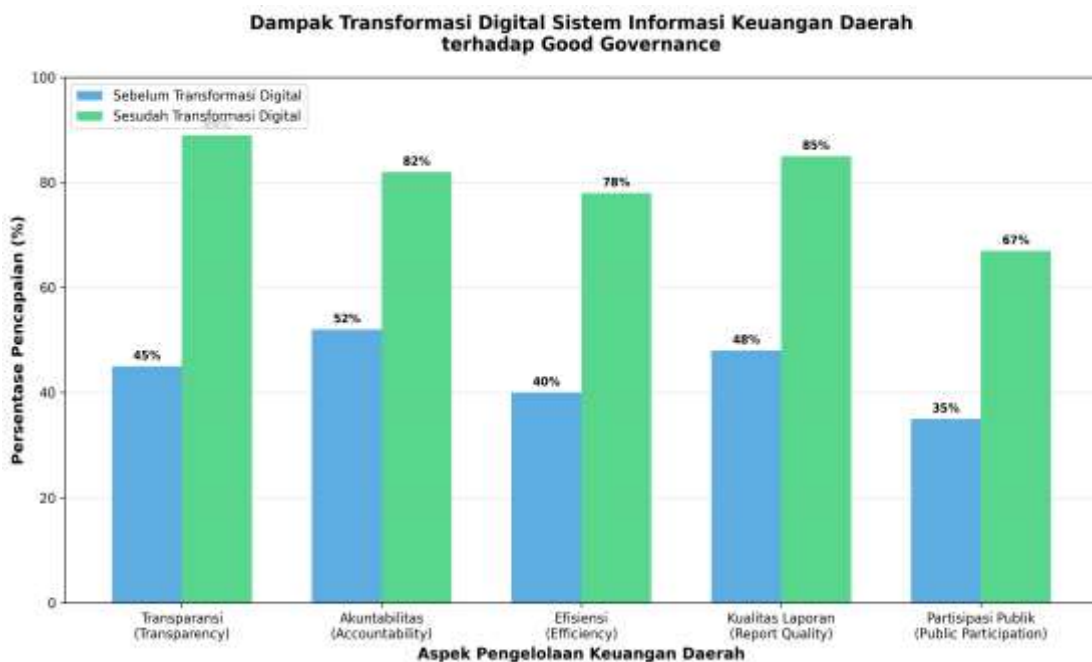
## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Transformasi Digital Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan implementasi SIKD dan SIPD sebagai platform utama. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah memberikan kontribusi substantif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik. Studi di Bekasi menunjukkan bahwa transformasi sistem informasi keuangan digital secara signifikan mendukung optimalisasi proses pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan kesalahan pelaporan, mempercepat pemrosesan data, dan memperkuat proses pengambilan keputusan (Anwar et al., 2026).

Implementasi SIPD di berbagai pemerintah daerah menunjukkan pola yang beragam. Di Deli Serdang, SIPD berkontribusi terhadap keterbukaan informasi yang lebih baik, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Sianturi, 2023). Namun, beberapa hambatan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan isu infrastruktur digital masih teridentifikasi. Studi fenomenologis di Surakarta mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas pengelolaan keuangan, SIPD secara umum dianggap efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Diah Purwati & Witono, 2025).

Analisis tingkat kematangan digital sistem informasi keuangan daerah di DKI Jakarta menunjukkan bahwa *Digital Maturity Level* (DML) berada pada kategori "*early government level*" untuk empat faktor dan "*developing government level*" untuk satu faktor (Nainggolan & Valiant Salomo, 2024). Faktor kepemimpinan memperoleh hasil tertinggi yang menunjukkan kesadaran digital pemangku kepentingan, namun kesadaran ini belum mencapai tingkat yang canggih.



**Gambar 1.** Dampak Transformasi Digital SIKD/SIPD terhadap *Good Governance*

*Sumber: Sintesis dari berbagai studi empiris, 2019-2026*

### **Kontribusi Transformasi Digital terhadap Transparansi Keuangan Daerah**

Transformasi digital melalui implementasi SIKD/SIPD memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Studi menunjukkan bahwa e-government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap transparansi digital (Octavio & Urumsah, 2024). Praktik tata kelola yang baik dapat

mendorong transparansi dalam penyajian informasi keuangan dan non-keuangan, meskipun beberapa website pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diakses.

Implementasi *e-budgeting* sebagai komponen transformasi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi proses penganggaran dari 2-3 minggu menjadi 3-5 hari kerja, menyediakan akses informasi real-time kepada pemangku kepentingan, dan menciptakan audit trail digital yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Arianto et al., 2024). Di Surabaya, implementasi sistem informasi terintegrasi berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kekaburan birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik (Hidayat, 2024).

Studi di Medan menunjukkan bahwa integrasi data publik melalui SIPD meningkatkan transparansi melalui akses informasi keuangan yang lebih cepat, memperkuat konsistensi melalui format pelaporan terstandar, dan meningkatkan akurasi melalui sinkronisasi data lintas sistem (Faisal et al., 2025). Perbaikan-perbaikan ini secara kolektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal.

### **Penguatan Akuntabilitas melalui Sistem Informasi Keuangan Digital**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengalami penguatan substantif melalui implementasi sistem informasi digital. Studi di Sidoarjo menunjukkan bahwa SIKSDA telah meningkatkan proses pelaporan keuangan dengan memperbaiki kecepatan dan akurasi, memastikan pencapaian target anggaran tepat waktu, memfasilitasi integrasi dengan sistem pajak, pengadaan, dan aset, serta menunjukkan adaptabilitas yang kuat terhadap perubahan regulasi (Anggraeni & Choiriyah, 2025).

Peran audit BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi semakin efektif dengan dukungan sistem informasi digital (Vanya et al., 2026). Audit BPK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal (SPIP), dan peningkatan akses publik terhadap informasi keuangan. Rekomendasi audit telah mendorong perbaikan dalam administrasi aset, efektivitas belanja, dan kepatuhan regulasi.

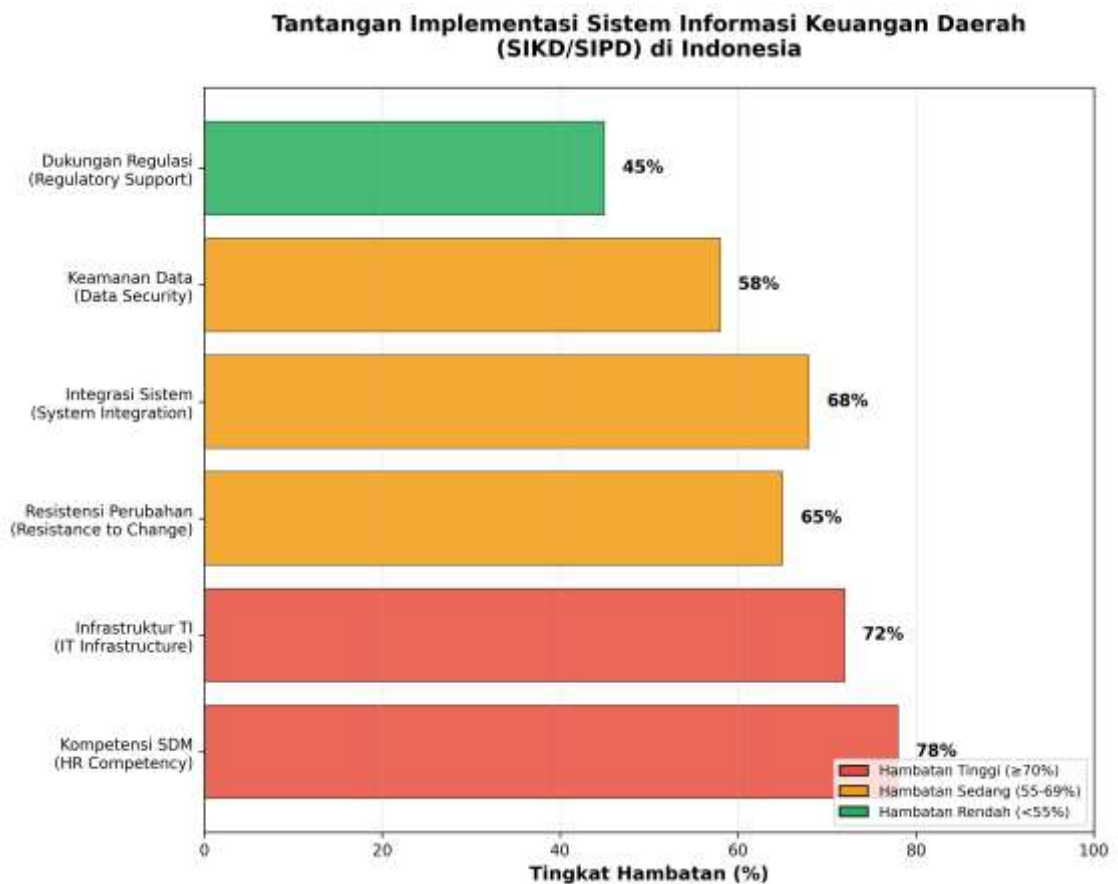
Penerapan akuntansi sektor publik yang didukung sistem informasi digital memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Tandibua' et al., 2024). Kejelasan penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas yang terlihat dari pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Tantangan dan Hambatan Implementasi**

Meskipun transformasi digital memberikan kontribusi positif, implementasi SIKD/SIPD masih menghadapi berbagai tantangan. Analisis hambatan dan tantangan transformasi digital AIS (*Accounting Information System*) di pemerintah daerah mengidentifikasi bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari aspek teknologi tetapi

juga melibatkan kesiapan organisasi secara keseluruhan (Olyvia Tambunan et al., 2026). Hambatan paling dominan meliputi: keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam teknologi akuntansi digital, resistensi pegawai terhadap perubahan budaya kerja, ketidaksiapan infrastruktur teknologi dan alokasi pendanaan, keselarasan prosedur dan regulasi yang belum optimal dengan kebutuhan sistem digital, serta ancaman keamanan informasi dan isu integrasi data antar aplikasi pemerintah.

Studi evaluasi SIPD dengan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di tiga provinsi menunjukkan adanya disparitas kapasitas kelembagaan yang menghambat optimalisasi SIPD (Fatoni, 2026). Evaluasi input mengungkapkan defisit dalam infrastruktur digital dan literasi sumber daya manusia. Proses operasional terganggu oleh kegagalan sinkronisasi API dan praktik pembukuan manual bayangan. Evaluasi produk menunjukkan disparitas manfaat: Jawa Barat mencapai efisiensi absolut, sementara Banten dan Jambi mengalami stagnasi pencairan anggaran.



**Gambar 2.** Tantangan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD) di Indonesia

*Sumber: Sintesis dari berbagai studi empiris, 2019-2026*

**Tabel 1.** Klasifikasi Tantangan Implementasi SIKD/SIPD

| <b>Kategori Tantangan</b> | <b>Deskripsi</b>   | <b>Tingkat Hambatan</b> |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Kompetensi SDM            | Keterbatasan kemampuan teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem digital | Tinggi                  |
| Infrastruktur TI          | Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak       | Tinggi                  |
| Resistensi Perubahan      | Penolakan terhadap perubahan budaya kerja dari manual ke digital           | Sedang                  |
| Integrasi Sistem          | Kesulitan dalam menghubungkan berbagai aplikasi keuangan yang berbeda      | Sedang                  |
| Keamanan Data             | Risiko kebocoran data dan serangan siber                                   | Sedang                  |
| Dukungan Regulasi         | Ketidakselarasan regulasi dengan kebutuhan transformasi digital            | Rendah                  |

*Sumber: Analisis berbagai studi, 2019-2026*

### **Strategi Optimalisasi Transformasi Digital**

Optimalisasi *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah memerlukan strategi komprehensif yang mencakup infrastruktur teknologi, interoperabilitas sistem, dukungan manajerial, kompetensi pengguna, dan kualitas layanan digital (Dwibin Kannapadang et al., 2025).

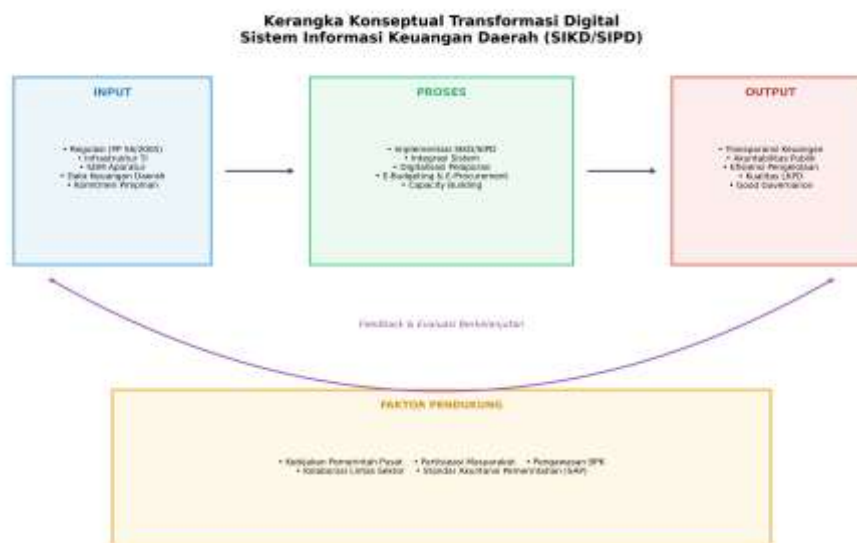
Studi menunjukkan bahwa optimalisasi *e-government* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap transparansi (*path coefficient* = 0,67;  $R^2$  = 0,58) dan akuntabilitas (*path coefficient* = 0,72;  $R^2$  = 0,64).

Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci optimalisasi keuangan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan (Desi Wahyuni, 2025). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sementara teknologi seperti *e-budgeting*, *blockchain*, dan SIPD dapat mempercepat proses perencanaan dan pemantauan anggaran.

Studi di Jombang menunjukkan bahwa integrasi transformasi digital dan kolaborasi pemerintahan multi-level dalam pendataan pajak daerah menghasilkan dua kontribusi utama: perluasan basis data objek pajak yang ditunjukkan dengan peningkatan data terverifikasi sebesar 9,16% dan efisiensi administrasi fiskal melalui percepatan pendataan serta peningkatan rata-rata realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 13,5% (Nisa & Tamrin, 2025).

### Model Konseptual Transformasi Digital Keuangan Daerah

Berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian, dapat dirumuskan model konseptual transformasi digital sistem informasi keuangan daerah yang mengintegrasikan komponen input, proses, dan output dalam kerangka *good governance*.



**Gambar 3.** Kerangka Konseptual Transformasi Digital Sistem Informasi Keuangan Daerah

*Sumber: Konstruksi peneliti berdasarkan sintesis literatur*

Model konseptual ini menunjukkan bahwa transformasi digital keuangan daerah memerlukan input berupa regulasi yang memadai, infrastruktur TI, SDM aparatur yang kompeten, data keuangan yang akurat, dan komitmen kepemimpinan (Fauzia et al., 2025). Proses transformasi melibatkan implementasi SIKD/SIPD, integrasi sistem, digitalisasi pelaporan, e-budgeting, e-procurement, dan pengembangan kapasitas. Output yang diharapkan mencakup transparansi keuangan, akuntabilitas publik, efisiensi pengelolaan, kualitas LKPD, dan terwujudnya *good governance* (Jiman et al., 2025).

## **Implikasi Bagi Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah**

### **1. Implikasi Teoretis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman transformasi digital dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Temuan-temuan empiris mengkonfirmasi relevansi pendekatan *Digital Governance*, *Socio-Technical Systems*, dan *New Public Management* dalam menjelaskan dinamika adopsi teknologi, kesiapan kelembagaan, dan orientasi pada efisiensi serta akuntabilitas (Nisa & Tamrin, 2025). Integrasi perspektif teoretis ini memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk memahami kompleksitas transformasi digital di sektor publik.

Hasil penelitian juga memperkuat proposisi bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi semata, tetapi juga melibatkan dimensi manusia dan organisasi (Lakat, 2025). *Perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *perceived risk* menjadi determinan penting dalam adopsi sistem informasi keuangan oleh aparatur pemerintah daerah.

### **2. Implikasi Praktis**

Bagi BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah, temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan dalam optimalisasi transformasi digital sistem informasi keuangan daerah:

**Pertama**, penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan mengenai pengoperasian SIKD/SIPD, pemahaman regulasi keuangan, dan literasi digital (Daud et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pemahaman regulasi keuangan dan kemampuan mengoperasikan SIPD cenderung lebih bertanggungjawab dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran daerah.

**Kedua**, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi (Sianturi, 2023). Hal ini mencakup peningkatan konektivitas jaringan, penyediaan perangkat keras dan lunak yang memadai, serta penguatan sistem keamanan data.

**Ketiga**, peningkatan transparansi melalui publikasi informasi keuangan yang tepat waktu dan dapat diakses oleh masyarakat (Octavio & Urumsah, 2024). Pengembangan portal informasi keuangan yang *user-friendly* dan penyediaan data dalam format yang

mudah dipahami akan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan anggaran.

**Keempat**, penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme audit yang terintegrasi dengan sistem informasi digital (Vanya et al., 2026). Audit trail digital dan validasi otomatis akan memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

### 3. Rekomendasi Kebijakan

**Tabel 2.** Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Transformasi Digital BAPENDA Prov. Kalteng

| Aspek              | Rekomendasi  | Prioritas |
|--------------------|--|-----------|
| SDM                | Pelatihan berkelanjutan SIPD dan literasi digital  | Tinggi    |
| Infrastruktur      | Peningkatan konektivitas dan keamanan sistem       | Tinggi    |
| Regulasi           | Harmonisasi peraturan daerah dengan sistem digital | Sedang    |
| Partisipasi Publik | Pengembangan portal transparansi keuangan          | Sedang    |
| Integrasi Sistem   | Standarisasi dan interoperabilitas aplikasi        | Tinggi    |
| Monitoring         | Evaluasi berkala efektivitas implementasi          | Sedang    |

### SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai studi empiris mengenai transformasi digital sistem informasi keuangan daerah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIKD/SIPD memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Rizki Maulidi et al., 2025)). Transformasi digital mendukung keterbukaan informasi keuangan, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban melalui audit trail digital, meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan, dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun demikian, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan yang mencakup keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur

teknologi yang belum merata, resistensi terhadap perubahan, dan isu integrasi sistem ((Olyvia Tambunan et al., 2026). Disparitas kapasitas kelembagaan antar daerah mengakibatkan variasi dalam tingkat keberhasilan implementasi, yang menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal.

Keberhasilan transformasi digital sistem informasi keuangan daerah memerlukan sinergi antara aspek teknologi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen kepemimpinan (Suraya Murcitaningrum & Yorman, 2026). Kolaborasi lintas sektor, penguatan kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

### **Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris langsung di BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan kualitatif atau campuran untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi transformasi digital dalam konteks spesifik. Penggunaan metode evaluasi seperti CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi dan area yang memerlukan perbaikan (Fatoni, 2026).

Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk memprioritaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk konektivitas jaringan di wilayah terpencil, juga menjadi prioritas penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital (Desi Wahyuni, 2025). Harmonisasi regulasi daerah dengan kebutuhan sistem digital dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan akan memperkuat legitimasi dan efektivitas transformasi digital dalam mewujudkan *good governance* keuangan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, W., Brawijaya, U., Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). *Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Anggraeni, W., & Choiriyah, I. U. (2025). THE EFFECTIVENESS OF THE SIDOARJO FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (SIKSDA) IN IMPROVING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF SIDOARJO REGENCY. *Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 1053–1068. <https://doi.org/10.61796/icossh.v2i2.353>
- Anwar, D. M., Emita, I., Melyani, M., Rahadjeng, I. R., Indrarti, W., Rafik, A., & Sari,

- D. I. (2026). Optimizing Regional Financial Management through the Transformation of the Digital Financial Information System in the Bekasi City Government. *Journal of Technology Informatics and Engineering*, 5(1), 200–218. <https://doi.org/10.51903/jtie.v5i1.495>
- Arianto, Amanda, A., Fadhillah, A., Nur Fadila Qomari, F., Faizul Candra, I., Putri, M., & Saputra, B. (2024). *DAN INFORMATIKA KOTA PADANG E-BUDGETING IMPLEMENTATION ON PUBLIC FINANCIAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY AT THE COMMUNICATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF PADANG CITY*.
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Cahyo, P., Sekolah, W., Pembangunan, T., Desa, M., Apmd, ", Yogyakarta, ", Suradji, A., Sekolah, M., & Artikel, I. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) The Influence of Good Governance Principles on Financial Management of the Regional Secretariat in Kulon Progo Regency INFO PENULIS*. 5(3). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttps://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Daud, N., Blongkod, H., & Yusuf, N. (2025). *Mandalika Journal of Business and Management Studies the Effect of The Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on Regional Financial Management Accountability*. 3(1), 2025. <https://journal.institutemandalika.com/index.php/mjbm>
- Desi Wahyuni. (2025). Cross-Sector Collaboration and Technology: Key to Optimizing Regional Finance for Equitable Development in Indonesia. *Dharma Ekonomi*, 32(1), 49–61. <https://doi.org/10.59725/de.v32i1.221>
- Diah Purwati, I., & Witono, B. (2025). PHENOMENOLOGICAL STUDY OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN THE CITY GOVERNMENT OF SURAKARTA. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Faisal, F., Lukman, H., & Ritonga, P. (2025). Transformation of Local Government

- Accounting Reporting Systems in the Era of Public Data Integration and Its Impact on Public Trust. *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(12), 3821–3836. <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i12.335>
- Fatoni, A. A. (2026). Optimizing Regional Financial Information Systems in Indonesia: A CIPP Evaluation Approach to Institutional Capacity Asymmetry. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 35–45. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3280>
- Fauzia, M., Surahman, N. P., Rizki, Mhd. N., Laia, T. P., & Irawan. (2025). The Effect of Employee Adaptation and Government Capacity on the Success of the Regional Government Information System (SIPD). *Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies*, 1, 488–494. <https://doi.org/10.64803/cessmuds.v1.97>
- Hardiyanto, F. (2025). Evaluation of Transparency and Accountability of Regional Government Financial Reports (LKPD) in Realizing Good Governance. In *Journal of Taxation Insights Policy Practice* (Vol. 1, Number 2).
- Hidayat, M. N. (2024). ENHANCING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN LOCAL GOVERNANCE THROUGH INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF SURABAYA CITY, INDONESIA. In *Desember* (Vol. 16, Number 3).
- Lakat, J. (2025). Digital transformation of public financial management: A case study of regional financial application integration in North Sulawesi. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 317–337. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.552>
- Mariana Natalia Tri De Wieke Jiman, Anthon Simon Y. Kerihi, & Minarni A. Dethan. (2025). Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 223–235. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.2017>
- Nainggolan, A. T., & Valiant Salomo, R. (2024). *Digital Maturity Level Analysis of the Regional Financial Management Information System for the Special Region of Jakarta Province*.
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 279–296. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361>
- Oktaviani, R. N., Nursida, N., Hidayati, A., & Arifin, J. (2025). *Analysis of Local*

- Government Information Systems on Financial Reporting Quality: Systematic Literature Review*. <https://doi.org/10.38035/gijea.v3i1>
- Olyvia Tambunan, H., Harahap, D., Manurung, R. F., Simamora, R. G., Lumban Gaol, R. N., & Supraja, G. (2026). Analysis of Obstacles and Challenges of Digital Transformation of AIS in Local Government. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 4(2), 181–189.
- Padri, A. R. (2025). The Impact of the Implementation of the Regional Financial Information System (SIPKD) on the Effectiveness of Regional Financial Management. In *Journal of Taxation Insights Policy Practice* (Vol. 1, Number 2).
- Rafdiansyah, Moh., & Ronaboyd Irfa. (2022). Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1). <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Rizki Maulidi, M., Saafira, Z., Nabila, J., Mariana, M., Bisnis, J., & Negeri Lhokseumawe, P. (2025). *DIGITAL TRANSFORMATION IN LOCAL GOVERNMENT: ENHANCING FINANCIAL TRANSPARENCY THROUGH THE REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (SIKD)*. 4(1).
- Sianturi, J. M. (2023). *Penerbit: LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) THE ROLE OF SIPD APPLICATION IN INCREASING TRANSPARENCY AND BUREAUCRACY IN DELI SERDANG REGENCY GOVERNMENT*. <https://ejournalsjp.lkispol.or.id>
- Silvia Hardianti Manik, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, & Henny Andiyani Wirananda. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(3), 125–134. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3.3178>
- Siti Khofifah Hanif, Lidya Vanya F. Sihombing, Yendita Pakpahan, Muhammad Yudi Fajri, & Alexa Angelica Nababan. (2025). Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14895–14899. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>
- Suraya Murcitaningrum, & Yorman. (2026). Digital Transformation Strategies for Enhancing Transparency and Efficiency in Indonesian Local Government Administration: A Multi-Document Triangulation and Thematic Maturity Analysis. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.58218/kasta.v6i1.2405>
- Tandibua', I., Idris, M., & Faridah, F. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor

Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(2), 122–127. <https://doi.org/10.56326/access.v2i2.2796>

Vanya, S., Aftrin, O., Pasaribu, A., Anu, K., Ata, A., & Purnamasari Baso, S. (2026). Peran Audit BPK dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi NTT Kota Kupang. In *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (Vol. 9, Number 1).